

Referensi

- Angeles, G., Guilkey, D. K., & Mroz, T. A. 2005. The effects of education and family planning programs on fertility in Indonesia. *Economic Development and Cultural Change*, 54 (1), 165-201. DOI: 10.1086/431261
- Angeles, G., Guilkey, D. K., & Mroz, T. A. 2017. Are Family Planning Programs Effective?: The Effect of FP Programs and Education on Fertility in Indonesia. Paper Presentation. Center for Global Development, Third Annual Birdsall House Conference, "Reproductive Choices to Life Chances: The Links Between Contraception and Women's Economic Empowerment".
- Diamond, I., Newby, M. and Varle, S. 1999. Female Education and Fertility: Examining the Links in Bledsoe, C. H., Casterline, J. B., Johnson-Kuhn, J. A and Haaga, J. G. (eds.). 1999. *Critical Perspectives on Schooling and Fertility in the Developing World*. Washington, D.C.: National Academy Press. <https://www.nap.edu/read/6272/chapter/3>
- Foster, A. and Roy, N. 1997. The Dynamics of Education and Fertility: Evidence from a Family Planning Experiment. University of Pennsylvania
- Jejeebhoy, S.J. 1995. *Women's Education, Autonomy and Reproductive Behaviour: Experience from Developing Countries*. Oxford: Clarendon Press.
- Martin, Linca G., 1980. "Fertility and education: What do we really know? : Susan Hill Cochrane (Published for the World Bank, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1979) pp. xii + 175. *Journal of Development Economics*. Elsevier. Vol. 7(4), pages 591-591, December.
- Mauldin, W.P., and J.A. Ross. 1991. Family Planning Programs: Efforts and Results, 1982-1989. *Studies in Family Planning*. Volume 22 Page 350-367.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Plan Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM tahun 2011 tentang 'Praktik Pernikahan Dini di Indonesia' di delapan wilayah: Indramayu, Grobogan, Rembang, Tabanan, Dompur, Sikka, Lembata, dan Timur Tengah Selatan (TTS)
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013
- Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012
- Yayasan Kusuma Buana dan USAID. 1994. Buku Panduan Untuk Program Pelayanan Keluarga Berencana. Yayasan Kusuma Buana dan USAID



Policy Brief 2018

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Berhasil

Keluarga Sejahtera, Indonesia Pintar

Capaian Pendidikan di Indonesia

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut berarti negara memiliki kewajiban penuh dalam melaksanakan pendidikan bagi setiap warga negaranya. Meskipun makna pendidikan memiliki arti yang sangat luas, akan tetapi salah satu acuan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah melalui pendidikan formal.

Beberapa indikator dibuat untuk mengukur bagaimana capaian pembangunan pendidikan. Pada level nasional, untuk mengukur keberhasilan pada penyelenggaraan capaian pendidikan formal, indikator yang sering digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APSK) dan Angka Partisipasi Sekolah Murni (APSM). Indikator lain yang digunakan untuk melihat capaian pendidikan adalah jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk serta indikator rata-rata lama sekolah.

Hubungan Keluarga Berencana dengan Pendidikan

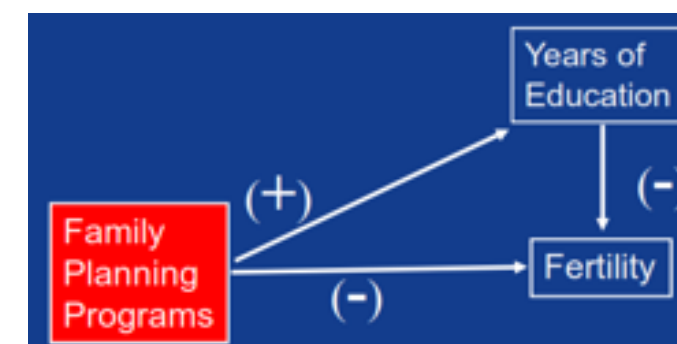
Terdapat hubungan saling mempengaruhi dua antara keluarga berencana dan pendidikan. Di satu sisi, program keluarga berencana memiliki manfaat yang penting untuk menurunkan fertilitas wanita dan meningkatkan pendidikan anak-anak mereka (Foster and Roy, 1997). Sedangkan di sisi lain, peningkatan pendidikan, utamanya pendidikan perempuan, merupakan

cara yang efektif untuk mensukseskan program keluarga berencana (Angeles, Guilkey dan Mroz, 2005).

Di Indonesia sendiri, Angeles, Guilkey dan Mroz (2005) mencoba menjelaskan hubungan antara program KB, pendidikan dengan penurunan fertilitas. Data yang digunakan untuk melihat ketiga hubungan tersebut adalah data Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Sakerti). Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah hubungan antara program KB, pendidikan dan fertilitas memiliki hubungan yang kompleks.

Secara umum, pendidikan dan program KB memiliki pengaruh terhadap penurunan fertilitas di Indonesia. Meskipun sama-sama memiliki

Hubungan Program KB, Lama Sekolah dan Fertilitas di Indonesia



Sumber : Angeles, Guilkey dan Mroz (2017)

pengaruh, program KB di Indonesia memiliki efek yang jauh lebih besar untuk mengurangi fertilitas daripada pengurangan fertilitas yang disebabkan



Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Direktorat Advokasi dan KIE
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Jl. Permata No. 1, Halim Perdana Kusuma
Jakarta Timur 13650, PO BOX 296 JKT 13013
Telepon 021-8098018 ext 421

Situs Web <http://www.bkkbn.go.id>

oleh peningkatan kualitas pendidikan.

Lebih lanjut, Angeles, Guilkey dan Mroz (2017) hubungan antara program KB, pendidikan dengan penurunan fertilitas di Indonesia yang kompleks. Pada Gambar diatas, dapat dilihat bagaimana hubungan antara program KB, pendidikan dan fertilitas di Indonesia. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa KB dan pendidikan sama-sama memiliki hubungan negatif dengan fertilitas. Artinya, semakin baik lama sekolah dan program KB maka fertilitas akan turun. Selain itu, program KB juga akan mempengaruhi lama sekolah dalam artian meningkatkan pendidikan pada generasi berikutnya. Temuan ini sama dengan tulisan Foster and Roy pada 1997.

Dengan melihat kondisi ini maka menjadi strategis bagi Indonesia dan daerah-daerah di Indonesia untuk memberikan investasi lebih besar pada program KB karena ia akan mempengaruhi dua variabel ini.

Dalam kaitan dengan pendidikan, keluarga dengan anak sedikit dan jarak kelahiran yang lebar akan memungkinkan mereka berinvestasi untuk pendidikan anaknya. Hal itu akan memberikan keuntungan khusus bagi anak perempuan karena umumnya anak perempuan memperoleh prioritas yang rendah dibandingkan anak laki-laki.

Dampak positif pada aspek pendidikan pada anak selain terjadi karena orang tua (ibu atau ayah) menjadi akseptor KB, juga terjadi ketika si anak tidak menikah di usia anak atau remaja. Ketika anak atau remaja tidak buru-buru menikah maka ia dapat melanjutkan sekolah.

Ancaman Kegagalan Pembangunan Pendidikan Karena Perkawinan Anak/Remaja

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Hal ini ditengarai sebagai salah satu penyebab tingginya perkawinan anak atau remaja.

Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SKDI) tahun 2012 menunjukkan sebanyak 45 persen perempuan menikah di bawah usia 20 tahun, dengan perincian 4,2 persen menikah di

usia antara 10 sampai 14 tahun, dan 41,8 persen menikah pada usia 15 sampai 19 tahun.

Sementara Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa di antara perempuan 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26% perempuan di bawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal.

Ketika anak putus sekolah karena perkawinan, maka ia tidak akan maksimal dalam memainkan perannya dalam berbagai lingkungan hidup di masa berikut dan ia akan kurang cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Hal ini karena itulah makna dari pendidikan.

Dampak dari perkawinan anak atau remaja ini tidak saja meliputi isu putusnya pendidikan, terutama anak perempuan, tetapi juga melibatkan isu-isu lain yang lebih luas seperti:

Masalah Kesehatan

- Kanker serviks, karena perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun akan lebih berisiko terkena kanker leher rahim sebab keadaan sel leher rahim belum matang benar sehingga saat terpapar Human Papiloma Virus atau HPV.
- Ancaman kematian karena tubuh yang belum siap melahirkan.
- Meningkatnya angka kematian anak, karena seorang ibu di bawah umur akan cenderung melahirkan bayi yang cacat atau memiliki gangguan kesehatan.

Dampak Psikologi

- Emosi remaja yang masih labil akan sulit untuk membina keluarga yang normal.
- Neoritis Depresi atau depresi dalam tingkatan berat karena pernikahan dini bisa terjadi di kondisi kepribadian yang berbeda. Untuk kepribadian introvert atau tertutup, maka membuat orang tersebut lebih menarik diri dari pergaulan, lebih pendiam, tidak ingin bergaul bahkan sampai menjadi schizoprenia.

Masalah Sosial

- Meningkatnya pekerja anak/bawah umur.

- Anak terlantar, karena pasangan yang menikah dalam usia terlalu muda seringkali juga akan melahirkan banyak anak sebab tidak menjalani keluarga berencana dan tidak memahami dengan baik tentang berbagai alat kontrasepsi. Ini mengakibatkan banyak anak yang tidak tercukupi kebutuhannya dan ditelantarkan oleh orang tua atau bahkan sampai diberikan pada orang lain.
- Kekerasan dalam rumah tangga
- Tekanan sosial, remaja pria akan dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarga meski usia masih terbilang sangat muda.

Masalah di atas adalah sekedar contoh, pada kenyataannya masalah yang timbul lebih kompleks.

Jika dicermati, walaupun ilustrasi dampak di atas ketika anak putus sekolah akibat perkawinan anak/remaja ada dalam ranah non pendidikan (kesehatan, psikologi, sosial, dll), namun hakekatnya kegagalan di bidang itu adalah juga kegagalan di bidang pendidikan.

Apa yang Perlu dilakukan Untuk Menjamin Keberhasilan Pembangunan Pendidikan dari Sisi Keluarga Berencana?

Dengan mengacu pada situasi di atas melihat program keluarga berencana sebagai penopang pembangunan pendidikan menjadi penting. Artinya, keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan di bidang keluarga berencana.

Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mengembangkan integrasi Program KB dalam kurikulum pendidikan formal sampai Perguruan Tinggi.

- Meningkatkan investasi pembangunan pada upaya untuk meningkatkan kesertaan **Keluarga Berencana** (KB), karena selain berdampak pada situasi kependudukan yang kondusif bagi pembangunan daerah, hal ini juga akan membuat kaum perempuan meningkat status kesehatannya dan akan mampu berpartisipasi secara produktif dalam pembangunan ekonomi daerah. Keluarga yang sejahtera akan melahirkan generasi yang unggul karena mampu menjamin pendidikan anggota keluarganya.
- Menyiapkan generasi yang akan menjadi angkatan kerja dari sisi kualitas di segala aspek kehidupan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan investasi dalam program **Generasi Berencana** (Genre) yang menyiapkan generasi untuk mampu menghadapi masa depan mereka dengan maksimal.
- Saat ini tengah ada upaya perubahan di tingkat nasional untuk merevisi peraturan mengenai usia perkawinan karena sudah banyak bukti menunjukkan perkawinan anak/remaja akan membawa banyak dampak negatif. Hal ini pada gilirannya akan berdampak negatif juga pada pencapaian IPM daerah dari sisi pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu daerah perlu mendorong **Pendewasaan Usia Perkawinan** (PUP), sehingga mencapai usia minimal 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. ***